

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Muhammad Sofyan, et.al. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta; Kencana.
- Abdullah Sulaiman. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta; UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya.
- Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta; Kencana.
- Barda Nawawi. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang; Pustaka Magister.
- H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta; Deepublish.
- I Ketut Sudira. 2016. *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*. ed. Mahrus Ali. Yogyakarta; UII Press.
- Jean Calvin. 2023. *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. Depok; RajaGrafindo Persada.
- Jonaedi Efendi & Jhonny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta; Kencana.
- Lilik Mulyadi. 2022. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung; Alumni.
- Mahkamah Agung RI. 2020. *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan)*.
- Maidinah Rahmawati, dkk. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan; Institute for Criminal Justice Reform.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.
- Sukardi. 2020. *Konsep Penyidikan Restorative Justice*. Depok; RajaGrafindo Persada.
- _____. 2020. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung; Lubuk Agung.

Suteki & Taufani Galang.2018.*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik)*.Depok; PT RajaGrafindo Persada.

Taufik Yanuar Chandra.2022.*HUKUM PIDANA*.Bekasi; PT. Sangir Multi Usaha.

Yoyok Ucu & Dadang Firdiyanto.2020.*MEDIASI PENAL: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*.Yogyakarta; LaksBang Justitia.

JURNAL

Andi Najemi.2018.*Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan,Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*.Jurnal Hukum. Volume 01 Nomor 01.

Budi Astuti & Rusdi Daud.2023.*Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*.Al-Qitish Law Review. Volume 6 Nomor2.

Dennis Kojongian.2015.*Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan*.Lex Crimen. Volume IV.

Elmayanti & Mukhlis R.2022.*Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*.Riau Law Journal. Volume 4 Nomor 2.

Fransisco Loleng, Roy R. Lembong, & Nixon Wullur.2021.*“Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia*.Lex Crimen.Volume10 Nomor 01.

Herlina Manullang.,et.al.2020.*“Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*.Nommensen Journal of Legal Opinion. Volume 01.

I Wayan Didik & I Ketut Rai.2021.*Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*.Udayana Master Law Journal. Volume 10 Nomor 4.

Musrizal,Syamsul Bahri & Maisarah.2020.*“Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat.”*. Media Kajian Komunikasi Islam. Volume 3 Nomor 02.

Mutiara Nelson.2020.*Due Process Model dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*.Hukum Pidana & Kriminologi.Volume 01 Nomor 01.

Ni Komang M.Y, Cristina, Ni Putu R. Yulianti, & Dewa Gede S. Magku.2019.*Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Karangsem*.e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum. Volume 02 Nomor 02.

Nursyamsudin Samud. 2022.*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHP*. Volume 7 Nomor 1.

Tino Hattu,Elsa R. Maya, & Hadibah Z. Wadjo.2021."*Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan*."JURNAL ILMU HUKUM, Volume 01 Nomor 10.

WEBSITE

Sovia Hasanah. "*Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)*". HUKUM ONLINE.Tindak Pidana Ringan (Tipiring) | Klinik Hukum online diakses pada hari Sabtu, 27 Januari 2024, pukul 10.51 WITA).

MYS.Bahasa Hukum: 'Diskresi' Pejabat Pemerintahan.Bahasa Hukum: 'Diskresi' Pejabat Pemerintahan (diakses pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 08.53 WITA).

SautP.Sinaga. *Polisi dan Kebaikan*. POLISI DAN KEBAIKAN – Polda Gorontalo (diakses pada hari sabtu, 29 Maret 2024 pukul 12.37 WITA).

Bernadetha Aurelia Oktavira. *Arti Ius Constitutum dan IusConstituendum*. Artilus Constitutum dan Ius Constituendum | Klinik Hukum online (diakses pada hari Rabu, 06 November 2024, pukul 12.00 WITA).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Peroman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

WAWANCARA

Iswan A., jabatan PS KaurmintuSAT SABHARA

Nofiar Dwi Poetra, jabatan Kanit TIPIDTER